

Narasi Kesejahteraan dan Produksi Kurban Sosial: Analisis Wacana Kritis dalam Pembangunan PSN Pulau Komodo

Bagus Ardiyansyah¹, Wahyu Budi Nugroho², Gede Kamajaya³, Briant Nor
Pradhuka⁴, Imron Hadi Tamim⁵

¹Universitas Udayana, bagus.ardiyansyah@unud.ac.id

²Universitas Udayana, wahyubudinug@unud.ac.id

³Universitas Udayana, kama.jaya@unud.ac.id

⁴Universitas Udayana, nor.pradhuka@unud.ac.id

⁵Universitas Udayana, el_tamam@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji unsur diskursif di balik narasi kesejahteraan, pariwisata premium, dan pembangunan berkelanjutan yang dilekatkan pada PSN Pulau Komodo, yang berpotensi melegitimasi pengorbanan masyarakat lokal demi kepentingan pembangunan, melalui perspektif analisis wacana kritis Norman Fairclough dan teori pyramids of sacrifice Peter L. Berger. Narasi kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan yang diproduksi pemerintah dalam wacana pariwisata premium berfungsi sebagai wacana legitimasi pembangunan. Sementara itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat lokal justru mengalami eksklusi ruang, keterbatasan partisipasi, serta menanggung biaya sosial dan ekologis akibat proyek pembangunan. Penelitian ini menemukan bahwa narasi pembangunan PSN Pulau Komodo menjadi instrumen diskursif yang melegitimasi pengorbanan masyarakat lokal sebagai konsekuensi yang seolah-olah dianggap wajar demi kepentingan pembangunan dan akumulasi modal. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang secara spesifik menggunakan analisis wacana kritis untuk membongkar narasi pemerintah dan produksi korban sosial dalam pembangunan PSN Pulau Komodo.

Kata kunci: Analisis wacana kritis; Kurban sosial; Legitimasi pembangunan

1. PENDAHULUAN

Proyek Strategis Nasional (PSN) bukan sekadar manifestasi teknokratis dari pertumbuhan fisik berupa infrastruktur yang dibalut dengan narasi kesejahteraan dan konservasi bertaraf internasional. Dalam sektor pariwisata, agenda tersebut memunculkan istilah pariwisata premium. Agenda pariwisata premium ini menjadi bagian dari transformasi ekonomi nasional yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat ketegangan sosial yang mendalam terkait pelaksanaannya. Misalnya, PSN di Pulau Komodo yang dinarasikan melalui diksi kesejahteraan dan konservasi bertaraf internasional, serta dikonstruksikan sebagai instrumen untuk memperkuat daya saing

pariwisata Indonesia sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat di kawasan Labuan Bajo dan sekitarnya, tidak terlepas dari kritik mengenai distribusi manfaat dan dampak sosial yang ditimbulkan. Sebagai contoh, terjadi marginalisasi terhadap masyarakat adat *Ata Modo* dalam bentuk perampasan ruang hidup, seperti kawasan hutan adat, kawasan keramat, dan tempat leluhur yang kemudian diubah menjadi kawasan taman nasional (Irfani, 2026).

Isu tersebut mencerminkan bagaimana kekuasaan menggunakan bahasa untuk membentuk realitas yang menguntungkan pihak tertentu. Dengan kata lain, penelitian ini memandang pembangunan sebagai arena produksi makna yang sarat dengan relasi kuasa. Oleh sebab itu, kajian ini menggunakan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough untuk mengkaji bagaimana narasi pembangunan diproduksi dan dilegitimasi melalui teks kebijakan pemerintah. Selain itu, teori *Pyramids of Sacrifice* Peter L. Berger digunakan untuk memahami bagaimana kelompok tertentu dapat dikorbankan atas nama tujuan pembangunan yang dianggap lebih besar atau kepentingan bersama, yakni sebagai “biaya manusia” yang harus dikurbankan demi ambisi pembangunan tersebut.

Lebih lanjut, pemerintah menempatkan Pulau Komodo sebagai salah satu destinasi pariwisata premium atau superprioritas melalui beragam proyek infrastruktur dan pengembangan kawasan wisata. Akan tetapi, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur dan investasi pariwisata tersebut juga melahirkan berbagai persoalan sosial. Persoalan tersebut mencakup perbedaan pandangan antara pemerintah, masyarakat lokal, dan kelompok lingkungan mengenai manfaat pembangunan pariwisata di Pulau Komodo, ketimpangan manfaat ekonomi, minimnya partisipasi masyarakat lokal, serta dampak ekologis dari wisata premium (Hasanah & Bayo, 2024; Choirisa, 2023). Selain itu, penelitian mengenai tata ruang di kawasan Bowosie menemukan adanya kebijakan tata ruang yang cenderung memfasilitasi kepentingan investasi dan berkontribusi terhadap eksklusivitas masyarakat lokal dari akses terhadap ruang dan sumber daya (Fenti et al., 2026).

Perkembangan tersebut memang meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga diikuti oleh tekanan sosial-budaya dan lingkungan yang semakin besar, seperti ketimpangan akses terhadap air bersih yang mengindikasikan bahwa kebutuhan sektor pariwisata lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat lokal (Cole, 2017; Hajar et al., 2026). Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat indikasi kesenjangan antara narasi kesejahteraan yang dipromosikan pemerintah dan pengalaman sebagian masyarakat terdampak (Marvela, 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough yang memandang bahasa sebagai praktik sosial yang berperan dalam membentuk, mereproduksi, dan melegitimasi relasi kuasa (Eriyanto, 2001). Melalui pendekatan ini, narasi kesejahteraan yang diproduksi pemerintah tidak dipahami sebagai informasi yang netral, melainkan sebagai konstruksi sosial yang mengandung kepentingan tertentu. Perspektif tersebut dipadukan dengan teori *Pyramids of Sacrifice* Berger (2004) yang menjelaskan bahwa proyek-proyek pembangunan sering kali memperoleh legitimasi melalui klaim kepentingan umum, meskipun dalam praktiknya terdapat kelompok yang harus menanggung biaya sosial, ekonomi, maupun ekologis. Dengan demikian, teori ini memungkinkan identifikasi terhadap aktor yang memperoleh keuntungan dan kelompok yang berpotensi menjadi korban dalam pembangunan PSN Pulau Komodo. Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini berupaya menjawab

dua pertanyaan: bagaimana narasi kesejahteraan dikonstruksikan dan dilegitimasi oleh pemerintah dalam pembangunan PSN Pulau Komodo? Bagaimana narasi tersebut berkontribusi terhadap produksi kurban sosial di kalangan masyarakat lokal?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough (Fee & Fairclough, 1993). Fokus penelitian diarahkan pada konstruksi narasi pemerintah mengenai pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pulau Komodo serta relasi kuasa yang bekerja di balik produksi wacana tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka secara mendalam terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) atau pembangunan Pulau Komodo. Periode penelitian mencakup rentang waktu transformasi kawasan dari tahun 2018 hingga 2024 yang mencerminkan fase krusial, mulai dari pengumuman rencana komersialisasi hingga akselerasi pembangunan infrastruktur fisik pariwisata superpremium di lapangan. Analisis dilakukan untuk mengungkap proses legitimasi pembangunan dan produksi kurban sosial.

3. ANALISIS DATA

Narasi pemerintah perihal PSN Pulau Komodo secara konsisten dibangun lewat istilah-istilah seperti *pariwisata premium*, *pembangunan berkelanjutan*, *transformasi ekonomi*, dan *peningkatan kesejahteraan masyarakat*. Representasi tersebut pada akhirnya menempatkan pembangunan sebagai kebutuhan bersama yang dianggap mampu meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia, khususnya Pulau Komodo, dalam kancah industri pariwisata global (Setiawati et al., 2023). Apalagi jika ditarik mundur, program ini bukanlah sesuatu yang baru terpikirkan, melainkan sudah ada sejak beberapa tahun sebelumnya, di mana istilahnya adalah pembangunan Jurassic Park. Hal ini bermula dari dikeluarkannya Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang izin pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. Permen ini kemudian menjadi payung bagi perusahaan-perusahaan swasta untuk berinvestasi di Indonesia, termasuk bagi perusahaan PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) mendapat konsesi lahan 426,7 hektar di Pulau Padar dan Pulau Komodo, kemudian untuk PT Segara Komodo Lestari (SKL) mendapat izin pengelolaan lahan 22,1 hektar di Pulau Rinca (CNN, 2020). Namun, sejak 2018 pengembangan Pulau Komodo sebagai kawasan pariwisata *premium* memperoleh penolakan dari sebagian masyarakat lokal yang mengkhawatirkan dampak pengelolaan oleh pihak swasta terhadap ruang hidup mereka.

Meskipun demikian, pemerintah terus memperkuat agenda pembangunan melalui berbagai regulasi dan kebijakan, termasuk penerbitan Permen LHK Nomor P.8 Tahun 2019 yang menyederhanakan proses perizinan investasi pariwisata melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Sejak 2019, pemerintah pusat secara aktif membangun narasi Pulau Komodo sebagai destinasi wisata kelas dunia (*world class tourism*), yang ditandai dengan

keterlibatan Kementerian LHK, Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, dan Pemerintah Provinsi NTT dalam penataan kawasan (CNN, 2020).

Wacana tersebut semakin menguat melalui promosi pembangunan wisata premium, termasuk konsep Jurassic Park di Pulau Rinca, serta berbagai proyek infrastruktur yang didukung oleh alokasi anggaran negara. Dalam berbagai pernyataan resmi, pembangunan diposisikan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing pariwisata, investasi, dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus melegitimasi transformasi kawasan konservasi menjadi ruang ekonomi yang terintegrasi dengan kepentingan industri pariwisata global. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa transformasi Taman Nasional Komodo menjadi destinasi pariwisata premium berakar pada kebijakan pemerintah yang membuka peluang investasi di kawasan konservasi. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi keterlibatan investor swasta dalam pengelolaan kawasan konservasi, termasuk di Taman Nasional Komodo, yang ditandai dengan pemberian izin kepada PT Komodo Wildlife Ecotourism dan PT Segara Komodo Lestari. Dengan kata lain, data menunjukkan bahwa pemerintah memberikan izin konsesi dan pengelolaan lahan yang luas kepada korporasi besar di dalam kawasan taman nasional. Tidak mengherankan apabila kebijakan ini memicu penolakan dari sebagian masyarakat yang menilai bahwa proses perencanaan dan konsultasi publik tidak berlangsung secara partisipatif (Miming, 2025).

Meskipun penolakan tersebut sempat menghambat implementasi proyek, pemerintah kembali memperkuat agenda pengembangan pariwisata hingga secara aktif membangun narasi Taman Nasional Komodo sebagai destinasi wisata kelas dunia, termasuk melalui gagasan pembangunan wisata Jurassic Park.

Lebih lanjut, di balik narasi kesejahteraan dan pembangunan pariwisata premium tersebut, masyarakat adat Ata Modo di Pulau Komodo menghadapi konflik agraria yang berlangsung sejak penetapan kawasan konservasi dan pariwisata. Berbagai kebijakan konservasi dan pariwisata secara bertahap membatasi akses masyarakat terhadap tanah dan ruang hidup yang telah mereka kelola secara turun-temurun, bahkan disertai relokasi paksa (KPA, 2021). Tidak dapat dipungkiri, proyek ini memicu persoalan agraria ketika penduduk lokal mengalami perampasan lahan dan penggusuran paksa demi mempercepat pembangunan infrastruktur. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat lokal kehilangan hak atas tanah yang telah mereka tempati selama puluhan tahun serta memiliki nilai historis dan kesakralan. Hal ini, misalnya, terlihat dari adanya diskriminasi akses terhadap air bersih serta kerusakan ekosistem yang mengancam kelangsungan hidup komodo. Bahkan, ironisnya, terdapat tindakan represif dari aparat terhadap aktivis dan warga yang menuntut transparansi serta keadilan sosial (Wijaya, 2025).

Selanjutnya, dalam konteks ekonomi, mata pencaharian masyarakat mulai mengalami gangguan akibat terbatasnya akses terhadap sumber daya yang pada akhirnya meningkatkan ketergantungan masyarakat lokal pada sektor pariwisata (Mongi et al., 2024; Wijaya, 2025). Peningkatan pembangunan fasilitas pariwisata juga cenderung diikuti oleh kenaikan harga atau tarif masuk ke kawasan wisata. Hal serupa terjadi di Pulau Komodo. Kenaikan tarif masuk ke kawasan tersebut dikhawatirkan memicu monopoli bisnis dan menurunkan jumlah wisatawan, yang pada akhirnya dapat merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Berdasarkan penjabaran di atas, terlihat adanya kesenjangan antara wacana pembangunan dan realitas sosial masyarakat lokal. Pola hidup masyarakat terus dipaksa berubah mengikuti regulasi terkait PSN Pulau Komodo. Bahkan, label superpremium seolah-olah menjadi alasan yang sah untuk meminggirkan masyarakat lokal meskipun prosesnya dilakukan secara halus. Padahal, pemerintah tidak melibatkan masyarakat lokal dan aktivis secara penuh dalam proses perencanaan serta pengambilan keputusan terkait PSN tersebut. Meskipun pemerintah mengklaim bahwa pembangunan ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi daerah, secara keseluruhan masyarakat lokal justru merasa menjadi korban dari ambisi pembangunan yang mengabaikan aspek keadilan sosial. Dalam perspektif Analisis Wacana Kritis Fairclough, narasi kesejahteraan berperan dalam mereproduksi relasi kuasa yang menguntungkan negara dan investor.

Narasi tersebut menunjukkan bagaimana negara mengonstruksikan investasi dan pembangunan pariwisata sebagai agenda strategis nasional, meskipun pada saat yang sama memunculkan resistensi dan kekhawatiran dari sebagian masyarakat lokal terhadap masa depan ruang hidup mereka. Secara tekstual, narasi pemerintah diproduksi menggunakan eufemisme pembangunan yang kuat dan sarat dengan konotasi positif, misalnya “wisata premium”, “destinasi bertaraf internasional”, “pembangunan untuk semua”, dan “semakin cantik”. Narasi tersebut pada kenyataannya berfungsi menciptakan “mitos pertumbuhan”, yaitu citra keberhasilan dari penataan infrastruktur. Wacana “infrastruktur untuk semua” berfungsi menaturalisasi proyek besar ini seolah-olah memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Di satu sisi, wacana Jurassic Park yang sempat viral digunakan sebagai label untuk mempromosikan eksklusivitas; di sisi lain, wacana tersebut dikritik karena dinilai mengubah paradigma konservasi alam menjadi model “kebun binatang” yang kaku. Secara lebih spesifik, berikut disajikan analisis wacana kritis pada dimensi teks dan praktik sosial berdasarkan kerangka Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough terhadap narasi PSN Pulau Komodo.

Tabel 1. Representasi dalam anak kalimat

Kutipan Anak Kalimat	Temuan atau Representasi yang Dibangun	Analisis Kritis
Pariwisata premium	Pulau Komodo direpresentasikan sebagai komoditas wisata eksklusif.	Sisi lainnya adalah istilah ini membangun citra kemajuan dan nilai ekonomi tinggi, sekaligus menggeser makna Pulau Komodo dari ruang hidup masyarakat menjadi objek ekonomi.
Destinasi wisata kelas dunia	Pulau Komodo direpresentasikan sebagai aset global.	Sisi lainnya adalah orientasi pembangunan diarahkan pada pasar internasional dibanding kebutuhan masyarakat lokal dan Komodo itu sendiri.

Pembangunan berkelanjutan	Pembangunan dianggap selaras dengan konservasi dan kesejahteraan.	Frasa ini berfungsi sebagai legitimasi moral yang menyamarkan potensi dampak sosial dan ekologis pembangunan.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pemerintah diposisikan sebagai aktor yang berpihak kepada rakyat.	Kesejahteraan menjadi justifikasi utama pembangunan. Namun, pada kenyataannya, terdapat kelompok yang dirugikan.
Transformasi ekonomi	Perubahan ekonomi direpresentasikan sebagai kebutuhan yang positif.	Narasi ini menggambarkan perubahan sosial-ekonomi sebagai sesuatu yang harus diterima demi kemajuan, meskipun perubahan tersebut menimbulkan pergeseran dari kondisi sebelumnya atau bahkan tidak berdasarkan pada transformasi ekonomi yang memang diperlukan oleh masyarakat lokal.

Tabel 2. Representasi dalam kombinasi anak kalimat

Kombinasi Anak Kalimat	Temuan atau Representasi yang Dibangun	Analisis Kritis
Pembangunan mampu meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia dalam industri pariwisata global.	Pembangunan dikonstruksikan sebagai solusi berbagai persoalan ekonomi.	Kombinasi klausa membangun hubungan sebab-akibat yang menempatkan pembangunan sebagai jalan menuju kemajuan dalam kerangka modernisasi.
Pemerintah memperkuat agenda pembangunan melalui regulasi dan kebijakan.	Negara direpresentasikan sebagai aktor pembangunan yang aktif dan progresif.	Narasi ini menggambarkan intervensi negara sebagai tindakan yang rasional dan diperlukan.
Kebijakan konservasi dan pariwisata membatasi akses masyarakat terhadap tanah dan ruang hidup.	Pembangunan dikaitkan dengan marginalisasi masyarakat lokal.	Narasi ini memperlihatkan hubungan langsung antara kebijakan negara dan hilangnya akses masyarakat terhadap sumber daya.

Tabel 3. Representasi dalam rangkaian antar kalimat

Kombinasi anak kalimat	Temuan yang dibangun atau Representasi yang dibangun	Analisis Kritis
Narasi dimulai dari kesejahteraan, investasi, dan pariwisata premium,	Terdapat pertentangan antara narasi resmi dan realitas sosial.	Pembangunan yang dipromosikan pemerintah menghasilkan konsekuensi sosial yang tidak

lalu diikuti oleh konflik agraria dan penggusuran.		disebutkan dalam wacana resmi. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara rencana dan realitas.
Pemerintah terus memperkuat regulasi meskipun terdapat penolakan dari masyarakat.	Negara direpresentasikan lebih responsif terhadap agenda pembangunan dibandingkan dengan aspirasi masyarakat.	Narasi ini menunjukkan dominasi kepentingan pembangunan atas partisipasi publik yang masih minim, terutama partisipasi masyarakat lokal.
Narasi kesejahteraan diakhiri dengan kesimpulan bahwa masyarakat menjadi korban pembangunan.	Validitas wacana kesejahteraan dipertanyakan.	Narasi ini menegaskan adanya kesenjangan antara klaim pembangunan dan pengalaman masyarakat lokal.

Tabel 4. Analisis Relasi

Aspek Relasi	Temuan yang Dibangun	Analisis Kritis
Pemerintah-Investor	Pemerintah menerbitkan regulasi yang mempermudah investasi dan memberikan konsesi lahan.	Relasi ini bersifat kolaboratif dan saling menguntungkan antara negara dan korporasi.
Pemerintah-Masyarakat Lokal	Partisipasi masyarakat terbatas dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.	Relasi ini menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan.
Masyarakat Lokal-Investor	Investor memperoleh akses legal terhadap kawasan yang sebelumnya menjadi ruang hidup masyarakat.	Relasi ini cenderung menghasilkan konflik kepentingan.

Tabel 5. Analisis Identitas

Aktor	Identitas yang dikonstruksi	Analisis Kritis
Pemerintah	Agen pembangunan, modernisasi, dan kesejahteraan.	Identitas ini memberikan legitimasi untuk menjalankan proyek pembangunan.
Investor	Mitra strategis pembangunan dan penggerak ekonomi.	Investor diposisikan sebagai aktor yang membawa kemajuan.
Masyarakat Lokal dan Komodo	Kelompok penerima dampak pembangunan	1. Identitas masyarakat lebih sering muncul sebagai objek

	sekaligus pemilik ruang hidup yang terancam.	daripada subjek pembangunan. 2. Menjadi kelompok yang mengalami marginalisasi akibat kebijakan pembangunan.
--	--	--

Tidak terbatas pada penjabaran di atas, apabila dianalisis dalam konteks situasional dan sosial berdasarkan Analisis Wacana Kritis Fairclough, hasil analisis dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. Situasional PSN Pulau Komodo

Aspek situasional	Analisis
Kemunculan Wacana	Wacana muncul dalam agenda pembangunan PSN dan program wisata superpremium yang menjadi prioritas pemerintah sebagai wujud narasi kesejahteraan.
Tujuan Wacana	Wacana bertujuan membentuk legitimasi publik terhadap investasi, pembangunan infrastruktur, dan transformasi kawasan konservasi menjadi destinasi wisata global.
Kondisi Sosial	Dalam implementasinya, masih terdapat resistensi dari masyarakat lokal akibat kekhawatiran terhadap dampak sosial, ekonomi, dan ekologis pembangunan.

Tabel 7. Analisis *Praktik Sosial*

Aspek praktik sosial	Temuan	Analisis Kritis
Konteks Politik	PSN Pulau Komodo merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional dan strategi pengembangan destinasi wisata superpremium.	Wacana pembangunan muncul dalam konteks negara yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing global. Kepentingan nasional dijadikan legitimasi untuk mempercepat proyek pembangunan.
Konteks Sosial	Terjadi konflik agraria, relokasi, pembatasan akses terhadap sumber daya, dan ketergantungan ekonomi masyarakat pada sektor pariwisata.	Pembangunan menghasilkan ketimpangan dalam distribusi manfaat. Masyarakat lokal menanggung biaya sosial yang lebih besar dibandingkan dengan manfaat ekonomi yang dijanjikan. Misalnya, tergerusnya hubungan historis dan sakral masyarakat

		dengan tanah, komodo, dan ruang hidup mereka.
Konteks Kekuasaan	Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat regulasi dan menentukan arah pembangunan, sedangkan masyarakat memiliki ruang partisipasi yang terbatas.	Terjadi reproduksi relasi kuasa yang cenderung menguntungkan pemerintah dan investor. Wacana kesejahteraan digunakan untuk melegitimasi kebijakan yang berpotensi meminggirkan masyarakat lokal.
Implikasi Sosial	Masyarakat mengalami perubahan pola hidup, kehilangan akses terhadap lahan, dan meningkatnya ketergantungan pada industri pariwisata.	Pembangunan tidak hanya mengubah lanskap fisik, tetapi juga mentransformasi struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal.

Biaya-biaya Manusiawai

PSN Pulau Komodo tidak hanya menghasilkan transformasi fisik dan ekonomi kawasan, tetapi juga menciptakan kelompok-kelompok sosial yang menanggung biaya pembangunan secara tidak proporsional. Dalam perspektif Berger (2004), melalui teori *Pyramids of Sacrifice*, kondisi ini menggambarkan bagaimana proyek pembangunan sering dibangun di atas pengorbanan kelompok tertentu yang diposisikan sebagai “kurban pembangunan”. Dalam konteks PSN Pulau Komodo, narasi “pariwisata premium”, “destinasi wisata kelas dunia”, “transformasi ekonomi”, dan “peningkatan kesejahteraan masyarakat” berfungsi sebagai instrumen legitimasi yang menempatkan pembangunan sebagai sesuatu yang tidak dapat ditolak. Manfaat pembangunan kemudian lebih banyak diarahkan pada peningkatan investasi, pertumbuhan sektor pariwisata, penguatan daya saing global, serta perluasan akumulasi modal bagi negara dan investor. Sebaliknya, masyarakat lokal justru menghadapi berbagai bentuk biaya sosial berupa konflik agraria, pembatasan akses terhadap ruang hidup, relokasi, ketergantungan ekonomi pada sektor pariwisata, hingga hilangnya akses terhadap sumber daya yang sebelumnya menjadi basis kehidupan mereka. Lebih jauh, kondisi ini menunjukkan adanya kalkulus penderitaan dan kalkulus makna dalam PSN Pulau Komodo.

Kalkulus penderitaan dapat dilihat dari dua sisi, yakni fisik dan nonfisik. Dalam dimensi fisik, pembangunan berskala besar ini menimbulkan beragam konsekuensi material yang langsung dialami masyarakat lokal, seperti penggusuran dan perampasan ruang hidup, pembatasan dan hilangnya akses terhadap sumber daya, ketimpangan akses, serta ancaman terhadap keberlanjutan ekosistem yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal, bahkan komodo itu sendiri. Sementara itu, dalam dimensi nonfisik, penderitaan muncul dalam bentuk hilangnya rasa aman terhadap masa depan ruang hidup, perasaan tersingkir dari proses pengambilan keputusan pembangunan, meningkatnya ketergantungan ekonomi pada sektor pariwisata, serta konflik sosial antara masyarakat, pemerintah, dan investor. Bentuk penderitaan semacam ini tidak selalu muncul dalam laporan keberhasilan pembangunan karena sulit diukur secara statistik. Namun, kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Berger (2004),

bahwa bentuk penderitaan inilah yang menunjukkan adanya kurban manusia dalam proyek pembangunan. Dengan demikian, pembangunan PSN Pulau Komodo tidak hanya memproduksi kerugian ekonomi dan ekologis, tetapi juga menghasilkan penderitaan psikologis, sosial, dan kultural yang dialami masyarakat lokal.

Selanjutnya, pembangunan juga memerlukan sistem makna yang mampu membuat penderitaan tersebut tampak rasional, dapat diterima, dianggap perlu, dan bahkan dinormalisasi. Melalui narasi kesejahteraan sebagai produksi makna dalam PSN Pulau Komodo, pembangunan dikonstruksikan sebagai simbol kemajuan, modernisasi, kesejahteraan masa depan, dan kebanggaan nasional. Dalam konstruksi tersebut, penderitaan yang dialami masyarakat lokal diposisikan sebagai pengorbanan yang dianggap perlu demi mencapai tujuan yang lebih besar. Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa narasi kesejahteraan dalam PSN Pulau Komodo bukan hanya berfungsi sebagai strategi komunikasi pembangunan, melainkan juga sebagai mekanisme ideologis yang membentuk kalkulus makna untuk membenarkan kalkulus penderitaan. Melalui proses tersebut, penderitaan fisik berupa kehilangan ruang hidup dan sumber daya, serta penderitaan nonfisik berupa marginalisasi, hilangnya identitas budaya, dan ketidakberdayaan politik, didefinisikan sebagai pengorbanan yang dianggap sah demi mewujudkan proyek pembangunan pariwisata premium. Inilah yang oleh Berger disebut sebagai pembentukan piramida kurban manusia, yaitu ketika kesejahteraan sebagian pihak dibangun di atas pengorbanan kelompok lain yang berada pada posisi sosial yang lebih lemah.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa narasi kesejahteraan, pariwisata premium, dan pembangunan berkelanjutan dalam PSN Pulau Komodo berfungsi sebagai instrumen diskursif yang melegitimasi agenda pembangunan melalui bahasa yang sarat dengan makna positif. Melalui Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, ditemukan bahwa wacana tersebut mereproduksi relasi kuasa yang menguntungkan pemerintah dan investor, sementara perspektif *Pyramids of Sacrifice* Peter L. Berger mengungkap adanya kalkulus makna yang membenarkan kalkulus penderitaan masyarakat lokal. Di balik janji kesejahteraan dan transformasi ekonomi, masyarakat adat dan komunitas lokal justru menanggung berbagai bentuk penderitaan fisik maupun nonfisik, seperti pembatasan akses terhadap ruang hidup, marginalisasi, serta hilangnya kontrol atas sumber daya dan identitas sosial-budaya. Dengan demikian, pembangunan PSN Pulau Komodo memperlihatkan bagaimana narasi kesejahteraan dapat berfungsi sebagai mekanisme legitimasi terhadap produksi kurban sosial dalam proyek pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan investasi.

REFERENSI

- Berger, Peter L. 2004. *Piramida Kurban Manusia; Etika Politik dan Perubahan Sosial*. Jakarta; LP3ES.
- Choirisa, Septi, Fahmi. 2023. *Pros and Cons Tourism Development in Komodo National*. (MIMBAR: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pembangunan. Desember 2023. Vol. 39 edisi 2). Bandung, FOB, UMN.
Di akses pada <https://journals.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/2755>

- CNN. (26 Oktober 2020). Mengenal Proyek “Jurassic Park” di NTT. Di akses pada <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201026142334-92-562801/mengenal-proyek-jurassic-park-di-ntt>
- Cole, Stroma. 2017. Annals of Tourism Research Water worries : An intersectional feminist political ecology of tourism and water in Labuan Bajo , Indonesia. (Annals of Tourism Research. Vol. 67) Bristol, Tourism Geography, Uwe Bristol. Di akses pada https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738317301123?utm_source=chatgpt.com
- Eriyanto. 2001. Analisis wacana: pengantar analisis teks media. Yogyakarta; LKiS.
- Fee, D., & Fairclough, N. (1993). Discourse and Social Change. *Contemporary Sociology*, 22(5), 732. <https://doi.org/10.2307/2074659>
- Fenti, Yustinus. Kevinsius., Lopo, Yonathan. H. L., & Ndoda, Philips. Y. N. 2026. *Politik Tata Ruang dan Eksklusi Masyarakat Lokal (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Hutan Bowosie Di Labuan Bajo)*. (AKTIVISME: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik, Dan Sosial Indonesia. April 2026. Vol.3. Edisi 2). FISIP, UNDANA. Di akses pada <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aktivisme/article/view/1644/1572>
- Hajar, Siti, Heri, Wahyudi, & Nur Ambia, Arma. 2026. Integrated Tourism Governance and Policy Fragmentation in Labuan Bajo: A Multi-Level Governance Perspective. (Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan. April 2026. Vol. 16 edisi 1). Makassar, FISIP, Unismuh Makassar. Diakses pada <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/20684>.
- Irfani, F. (2026). Nasib masyarakat adat Nusa Tenggara hingga Kalimantan terjepit taman nasional – 'Tanah ini dari leluhur, bukan negara'. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm2p1x79m9do>
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2021). "Nasib Masyarakat Komodo di Tengah Ancaman Proyek Strategis Nasional". (Edisi 2021). Jakarta, Konsorsium Pembaruan Agraria. Di akses pada <https://www.kpa.or.id/2021/11/nasib-masyarakat-komodo-di-tengah-ancaman-proyek-strategis-nasional/>
- Marvela. (06 Juni 2023). "Dragon for Sale, Film Dokumenter Kupas Sisi Lain Pembangunan Pariwisata di Labuan Bajo". Kompas Travel. Jakarta, Kompas Gramedia Digital Group. Diakses pada https://travel.kompas.com/read/2023/05/11/101000327/dampak-positif-ktt-asean-2023--dorong-pengembangan-infrastruktur-pariwisata?utm_source=chatgpt.com
- Miming, Adriani. (15 September 2025). "Perjalanan Taman Nasional Komodo: Diambil dari Warga Adat, Dikuasai Negara, Diobral ke Korporasi". Sunspirit for Justice and Peace. Jakarta, Sunspirit for Justice and Peace. Diakses pada <https://sunspiritforjusticeandpeace.org/2025/09/15/perjalanan-taman-nasional-komodo-diambil-dari-warga-adat-dikuasai-negara-diobral-ke-korporasi/3329/>
- Mongi, Elrin, Meivian, Fadhlila ,Afifah, Rachma, Fauziah, & Samuel,Rahallus. 2024. Tinjauan Perspektif Ekologi Politik: Persepsi Masyarakat terhadap Rencana Pembangunan Wisata Premium di Taman Nasional Komodo, Pulau Komodo. (ECOTOUR: Ecotourism and Environment Conservation. Februari 2024. Vol. 1 edisi 1). Jakarta, SIL UI. Diakses pada 1 November 2018 di <https://www.journal-iasssf.com/index.php/ECOTOUR/article/view/673>
- Setiawati, Ratih, Prananda, M., Hutabarat, Anastasia, K., Onarely, & Melania, B., Almatira. 2023. *Model Pengembangan Pariwisata Pulau Komodo sebagai Society-Based Sustainable Marine Tourism Village 5.0*. (Mediakom: Jurnal Ilmu Komunikasi. Juni 2023. Vol. 7 edisi 1). Jakarta, FIKOM UHAMKA. Diakses pada <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/mediakom/id/article/view/8863>

Wijaya, Janies. 2025. Strategic Issue Management in Opposing Land Grab, Environmental, and Humanitarian Violation of Super Premium Tourism Development. (Journal La Sociale. Januari 2025. Vol. 06 edisi 1). Jakarta, LSPR Institute of Communication & Business. Diakses pada https://newinera.com/index.php/JournalLaSociale/article/view/1446?utm_source=chatgpt.com